



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. LKJ Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKJ Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG


YAMOWAFA-HAREFA, AP.
NIP. 19750130 199402 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 *“Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat”*:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase penurunan gangguan trantibum, Formulasi Perhitungan : $(n - (n-1)) / (n-1) \times 100\%$ * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel

Capaian indikator (a.) *Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat* dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 5,0 %; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 5,50 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target 5 mencapai 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 5,0% terjadi peningkatan sebesar 0,5%.
2. Capaian sasaran strategis 2 *“Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran”*

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran, Formulasi Perhitungan : $(\text{Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran}) + (\text{Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran}) / 2 \times 100\%$

Capaian indikator (a.) *Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran* dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 5%; sampai dengan bulan

Desember 2025 terealisasi 4,90 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target 4,90 mencapai 100 %.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 4,00 % terjadi peningkatan sebesar 0,9 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Surat Edaran Gubernur 903.0583/Bakuda, Tanggal 29 September 2025 tentang Penundaan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2025
2. Surat Edaran Gubernur Nomor : 100.3.4.1/0695/VII tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) untuk menyusun dokumen yang sah dan legal dalam pelaksanaan kegiatan SPM.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja .Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	8
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	9
1.3 Isu-isu Strategis	10
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	11
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2024.....	19
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	27
3.2. Efisiensi Anggaran.....	46
3.3. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	49
3.4. Inovasi	50
3.5. Penghargaan.....	50
3.6. Cross Cutting	50
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Rekomendasi	52
4.3 Rencana Aksi.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	12
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	15
Tabel I.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024.....	16
Tabel I.4	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	16
Tabel II.1	Sasaran Strategis PD ...Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	19
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	19
Tabel II.3	Struktur Program dan Kegiatan <u>Terkait Langsung</u> Pencapaian Sasaran Tahun 2024 ...	20
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polis Pamong Praja	22
Tabel II.5	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja.....	22
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Kesatu Perubahan Kepala Satuan Polis Pamong Praja.....	23
Tabel II.7	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu.....	23
Tabel II.8	Perjanjian Kinerja Kedua Perubahan Kepala Satuan Polis Pamong Praja	24
Tabel II.9	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua	24
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	28
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	28
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	29
Tabel III.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024	34
Tabel III.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024	48
Tabel III.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	49

Daftar Gambar

Gambar I.1.	Cascading Kinerja	8
Gambar I.2.	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur SatpolPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8
Gambar I.3.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada SatpolPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9
Gambar II.1.	Website SatpolPP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25
Gambar II.2.	Layanan Pengaduan Melalui Website PD SatpolPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26
Gambar III.1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah.....	36
Gambar III.2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.....	40
Gambar III.3.	kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.....	46

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sbagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjainstansi.

1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
(halaman ini dapat di buat landscape)



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat Adapun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan provinsi;
- b. Penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



PETA JABATAN

Ket : Peta Jabatan lengkap dapat dilihat melalui link :

<https://bit.ly/PetaJabatanPOLPP>

1.3 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.”, antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang, Tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar; Tahun 2020 sejumlah 941, Tahun 2021, sejumlah 1737, Tahun 2022 sejumlah 749 serta tahun 2023 sejumlah 492 dan Tahun 2024 sejumlah 536 dan mengalami pengurangan pada Tahun 2025 sejumlah 506, penurunan ini menandakan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keadaan aman dan terkendali.
2. Kondisi kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat digambarkan dengan angka jumlah kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun *trendnya* menurun, terjadi tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus, Tahun 2020 sejumlah 1320, Tahun 2021, sejumlah 1127, Tahun 2022 sejumlah 1321 serta tahun 2023 sejumlah 1125 dan tahun 2024 berjumlah 222 sejumlah pada Tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan hal ini dikarenakan kerjasama yang baik antara masyarakat dan kepolisian sehingga lingkungan lebih aman dan kondusif.
3. Belum semua Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka , serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2024 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1254 orang, namun baru 820 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan dan tahun 2025 sejumlah 1280 orang (bertambah karena semakin banyak masyarakat yang

berpartisipasi untuk menjadi satlinmas);

4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran, Tahun 2020 terjadi 403 kasus kebakaran, Tahun 2021 terjadi sebanyak 227 kasus pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 225 , Tahun 2023 terjadi sejumlah 1955 kali kasus kebakaran dan hanya 1086 kejadian yang bisa dikategorikan sebagai kebakaran yang dilayani dalam waktu tanggap 15 menit (respon time), pada tahun 2024 terjadi kebakaran sejumlah 495 dan hanya 295 yang bisa dikategorikan dalam waktu tanggap 15 menit (respon time), pada tahun 2025 terjadi kebakaran sejumlah 170 dan hanya 148 yang bisa dikategorikan dalam waktu tanggap 15 menit (respon time) hal tersebut disebabkan karena sehingga sampai Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran harus dilakukan pengembangan terhadap kapasitas dan kompetensi pemadam kebakaran

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1.	Polisi Pamong Praja Madya	2	-	2	-	-	2	1	1	-	-	2	-
2.	Analisis Kebakaran Madya	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Polisi Pamong Praja Muda	22	-	22	-	-	22	-	22	-	-	22	-
4.	Analisis Kebakaran Muda	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pranata Humas Muda	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
6.	Pranata Humas Pertama	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Polisi Pamong Praja Pertama	25	-	25	-	-	4	-	4	-	-	3	1
8.	Analisis SDM Pertama	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Arsiparis Pertama	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pranata Komputer Pertama	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
11.	Analisis Kebakaran Pertama	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Polisi Pamong Praja Penyelia	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pemadam Kebakaran Penyelia	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	Polisi Pamong Praja Mahir	12	-	-	-	12	11	-	-	-	11	11	-
15.	Pemadam Kebakaran Mahir	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
16.	Polisi Pamong Praja Terampil	12	-	-	-	12	9	-	4	-	5	9	-
17.	Pranata Humas Terampil	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18.	Pemadam Kebakaran Terampil	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
19.	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-

20.	Pemadam Kebakaran Pelaksana Pemula	9	-	-	-	9	14	14	-	-	14	12	2
C	JABATAN PELAKSANA												
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	9	-	9	-	-	1	-	1	-	-	1	-
2.	Pamong Pemerintah	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1
3.	Fasilitator Pemerintah	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penata Layanan Operasional	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pengolah Data dan Informasi	4	-	-	4	-	1	-	-	1	-	1	-
6.	Pengelola Trantibum	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-
7.	Pengelola Layanan Operasional	3	-	-	3	-	1	-	-	1	-	1	-
8.	Operator Layanan Operasional	25	-	-	-	25	4	-	-	-	4	4	-
9.	Pengadministrasi Perkantoran	6	-	-	-	6	3	-	-	-	3	-	3
10.	Pranata Trantibum	105	-	-	-	105	10	-	-	-	10	6	4
D	TENAGA KONTRAK (HONORER)												
1.	Teknis Bantuan Polisi Pamong Praja	101	-	-	-	101	101	-	18	2	81	89	12
2.	Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6	-	-	-	6	6	-	1	1	4	3	3
3.	Tenaga Pelayanan Umum - Pengemudi	7	-	-	-	7	7	-	1	1	5	7	-
4.	Tenaga Pelayanan Umum - Pramu Kebersihan	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	1

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		
	Tanah	1	
2	Peralatan dan mesin		
	alat besar	5	
	alat angkutan	28	
	alat bengkel dan alat ukur	4	
	alat pertanian		
	alat kantor dan rumah tangga	893	
	alat studio, komunikasi dan pemancar	74	
	alat kedokteran dan kesehatan		
	alat laboratorium	2	
	alat persenjataan	485	
	Komputer	117	
	alat eksplorasi		
	alat pengeboran		
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		
	alat bantu eksplorasi		
	alat keselamatan kerja	26	
	alat peraga		
	peralatan proses/produksi		
	rambu – rambu		
	peralatan olah raga	1	
3	Gedung dan bangunan		
	bangunan gedung	6	
	monumen		
	bangunan menara		
	tugu titik kontrol/pasti		
4	Jalan, irigasi dan jaringan		
	jalan dan jembatan		
	bangunan air		
	instalasi		
	jaringan		
5	Aset tetap lainnya		
	bahan perpustakaan		
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahra		
	hewan		
	biota perairan		
	tanaman		
	barang koleksi non budaya		
	aset tetap dalam renovasi		
6	Konstruksi dalam pengerjaan		
	konstruksi dalam pengerjaan	1	
7	dll.		
	Total		

Kendaraan operasional Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 11 unit kendaraan operasional, 21 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruangbaca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadamkebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personalkomputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 3. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 60 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 75 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2025 dan 2026

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	23.229.624.779	885.653.100			24.115.277.879
2025	21.636.357.888	2.705.753.100			24.342.110.988

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 dibanding tahun 2025 terdapat kenaikan. Total anggaran belanja sebesar Rp 24.342.110.998. Hal ini menunjukkan adanya penambahan pembelian sarana dan prasarana mobil damkar dan pembeian mobil patroli pengamanan dan pengawalan untuk membiayai program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 70/98/LHE-ITDA/2025, Tanggal 28 April 2025 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah: 1. sudah dilakukan penyusunan SOP terkait dengan pengumpulan data kinerja dan

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	<p>Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya sehingga data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung pengukuran kinerja yang diharapkan 2. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang 3. Menyusun laporan kinerja dan konitoring evaluasi triwulan secara berkala 4. Melakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan SAKIP 5. Melakukan upaya sosialisasi dan implemtasi terhadap seluruh pegawai sehingga sepenuhnya peduli dan menjadikan laporan kinerja pedoman memperbaiki knerja 6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan 	<p>Dokumen Pendukung Capaian Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen Monev program dan kegiatan triwulan pada PD berjenjang 3. Menyusun rencana Laporan kinerja per triwulan berikutnya dengan menjelaskan target, realisasi dan capaian kinerja triwulan berjalan dan tahun sebelumnya 4. melakukan rapat internal untuk tindak lanjut terhadap Kertas Kerja Evaluasi Mandiri 5. melaksanakan dan ikut serta pada setiap melaksanakan pelatihan/diklat/bimtek/workshop/ sosialisasi/ evaluasi SAKIP dan menindaklanjuti kembali hasil bimtek tersebut pada OPD 6. sudah dilakukan dokumentasi dan pemberitaan pada setiap kegiatan POL PP

Bukti dukung tindak lanjut atas rekomendasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Pdf bukti dukung no 1 (surat undangan pelaksanaan rapat evaluasi per bidang-bidang untuk target, realisasi dan capaian kinerja bidang)
2. Pdf bukti dukung no 2 (foto rapat internal penyusunan laporan kinerja)
3. Pdf bukti dukung no 3 (daftar hadir Coaching clinic per bidang)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam Telp.(0717) 4255015
 PANGKALPINANG, 33418.

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : RABU / 19 FEBRUARI 2025
 WAKTU : 09.00 WIB - SELESAI
 TEMPAT : RUANG RAPAT SATPOL PP PROV. KEP. BABEL
 ACARA : BANYI YUNDALANJUT TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN KMK NOMOR 29 TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Sharta	Kepi Satpol	[Signature]
2	Ratna Pratiwi	Kabidag Perencanaan	[Signature]
3	Sahel	STAF	[Signature]
4	Suryana	STAF	[Signature]
5	Silviani	STAF	[Signature]
6	Suti Maya	STAF	[Signature]
7	Sarah	STAF	[Signature]
8	Naif	STAF	[Signature]
9	Yubirulita	Kabid	[Signature]
10	Riyanto Solipurno	Kasi	[Signature]
11	Leo Prastyo	Kasi	[Signature]
12	Petrus	STAF	[Signature]
13	M. Amhar	STAF	[Signature]
14	Yusuf	KABID PERDA PERKADA	[Signature]
15	Yusuf	STAF	[Signature]



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam
 Telp. (0717) 4255015 Pangkalpinang 33148

NOTULEN

Rapat : Rapat Internal Tindak Lanjut terhadap Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025
 Hari : Rabu, 19 Februari 2025
 Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Satpol PP
 Acara : Rapat Internal Tindak Lanjut terhadap Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025

PIMPINAN KEGIATAN RAPAT

Ketua : RATNA PRATIWI, S.STP., M.Si
 Pencatat : RATNA PRATIWI, S.STP., M.Si

Peserta Rapat

1. Kepala Bidang SATPOLPP (eselon III)
2. Kepala Subbagian Dan Kepala Seksi SATPOLPP (Eselon IV)
3. Pengurus Barang SATPOLPP
4. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
5. Pegawai Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan Rapat

1. Pembukaan
2. Kesepakatan
3. Penutup

RAPAT TINDAK LANJUT TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN KMK NOMOR 29 TAHUN 2025 RABU, 19 FEBRUARI 2025

Bidang Linmas



Bidang Perda & Perkada



Bidang Damkar



Bidang Tibumtranmas



Bidang Sekretariat



Nasi Ayam Goreng



BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatkan aspek kebebasan dalam demokrasi Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah : (sasaran sesuai renstra

1. Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
2. Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase		5,00	5.50	6,00	6,5	7	
2.	Menurunnya dampak dari kejadian pemadam, penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakarann	persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase		4	4,90	4,80	4,70	4,55	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penindakan gangguan trantibum 2. Pelatihan dan penguatan anggota Satlinmas se Provinsi Kep. Babel 3. Peningkatan kompetensi personil satpol pp dibuktikan dengan sertifikasi sesuai dengan jabatannya 4. Peningkatan penengakan perda/perkada yang mengandung sanksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 2. Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP 4. Penegakan perda dan perkada Provinsi Kep. Bangka Belitung
2.	Menurunnya dampak dari kejadian pemadam, penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Penyelenggaraan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran

Satuan Polis Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
1. Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	1.1. Program Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	7.248.143.450	7.277.280.250	(-)29.136.800
	1.1.1. Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	7.002.544.600	7.086.998.550	(-)84.453.950
	1.1.2. Kegiatan Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	193.599.150	158.184.000	35.415.150
	1.1.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	51.999.700	32.097.700	19.902.000
	1.2. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakara	3.343.936.650	2.835.389.150	(-)508.547.500
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	.3.258.936.900	2.736.389.400	(-) 522.547.500
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	84.999.750	98.999.750	14.000.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		10.592.080.100	10.112.669.400	(-)479.410.700

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama .Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor **188.4/019/SATPOLPP/2024**. (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polis Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Menurunnya gangguan ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	persentase	5,00%	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1,5 2,6 3,5 5,5
2	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	persentase	4,00 %	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1,2 2,5 3,6 4,9

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Persentase penurunan gangguan trantibum	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	7.277.280.250	
2	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakara	2.835.389.100	

2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kesatu)

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “ menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kesatu) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 1557.b /VI/SATPOLPP/2025 Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase	5,5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1,5 2,6 3,5 5,5
2	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase	4,90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1,2 2,5 3,6 4,9

Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Satuan Polisi Pamong Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Persentase penurunan gangguan trantibum	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	6.923.673.450	-
2	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.468.750.150	-

2.5.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kedua)

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 664.a/SATPOLPP/PKP/2025 Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase	5,5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1,5 2,6 3,5 5,5
2	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase	4,90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1,2 2,5 3,6 4,9

Tabel II.9 Komponen Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Persentase penurunan gangguan trantibum	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	7.277.280.250	Anggaran berkurang karena defisit anggaran
2	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.835.389.150	Anggaran berkurang karena defisit anggaran

Keterangan Tambahan:

1. Surat Edaran Gubernur 903.0583/Bakuda, Tanggal 29 September 2025 tentang Penundaan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Gubernur Nomor : 100.3.4.1/0695/VII tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga, yaitu:(nihil)
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu nihil

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <http://https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Pengaduan Masyarakat [LAPOR YAK! :: PROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG](http://https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id)

Gambar II.1. (Website)

<http://https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id>



Gambar II.2 (Layanan Pengaduan Masyarakat)
LAPOR YAK! :: PROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

The screenshot displays the LAPOR YAK! website interface. At the top, the URL is <https://lapor.babelprov.go.id>. The page features a dark blue header with the LAPOR YAK! logo and navigation links like 'Bookmarks', 'E-KINERJA', and 'Z.ai Chat - Free AI...'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a 'Formulir Pengaduan' (Report Form) with fields for 'Nama Lengkap (*)', 'N.L.K (*)', 'No. HP (*)', and 'Lokasi'. The right column features a 'MELI KEMERDEKAAN DAN KESEHATAN' banner and a section titled 'ALUR MEKANISME LAPOR YAK!' (LAPOR YAK! Mechanism Flow) with four numbered steps: 1. Masyarakat/pelapor pertama kali mengirimkan informasi lokasi (share location) ke nomor +62821-8064-0997; 2. Pelapor akan menerima balasan WA berupa kode angka; 3. Pelapor kemudian mengirimkan foto kejadian/pesan teks/dokumen lainnya dengan wajib menuliskan kode angka tersebut dengan format (kode angka) jangan lupa tanda kurung diikuti pesan yang ingin disampaikan. Misal jika kode angka yang diterima dari sistem adalah 5, maka format penulisan caption/keterangan: (5) Laporan kejadian saat ini seperti foto, pesan teks atau...; 4. Selanjutnya sistem mengirimkan konfirmasi, dan akan tercapam dan tampil pada web <https://lapor.babelprov.go.id/>. A 'Laporkan' button with the WhatsApp number +62821-8064-0997 is also visible.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025
(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Sasaran strategis	Indikator/meta indikator	Satuan	Base line 2022	Capaian 2025	Tahun 2025				Target akhir Renstra
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<u>Indikator:</u> Persentase penurunan gangguan trantibum <u>Formula Perhitungan:</u> $(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\%$ *n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel	%	41,43	5,50	5,50	5,50	100		6,00
2	Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran, pertolongan	<u>Indikator:</u> persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran <u>Formula Perhitungan:</u> (Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran) / 2 x 100%	%	52,11	4,90	4,90	4,90	100		4.80

Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat

Kinerja sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat diukur dengan indikator Persentase penurunan gangguan trantibum Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	$(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\%$ * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel

Kinerja sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $(n) - (n-1) / (n-1) \times 100\%$ * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 5,50% atau sebesar 100% dari target 5,50%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
(tabel ini dapat di buat landscape)

No	IndikatorSasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra(2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	5,0	5,0	100	5.50	100	5.50	6	6

Analisis Ketercapaian Sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100 (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 5,50 % (kolom 8) (terlampai).
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 5,00% (data LKJ Tahun lalu) indikator sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat mengalami peningkatan sebesar (0,50)%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kinerja program Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat mempunyai Indikator kinerja Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah gangguan trantibum yang ditindak dibagi jumlah gangguan trantibum yang

diketahui oleh Satpol PP Provinsi Kep. Babel dikali 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(506/496) \times 100\% = 102\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 100% atau sebesar 102%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 80% (capaian tahun lalu).

- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Minimnya sarana dan prasarana ketertiban dan ketentraman Masyarakat
 - b. Sebagian besar anggota Satpol PP sudah memiliki ketrampilan Diklat Dasar
 - Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah
 - a. Minimnya sarana dan prasarana ketertiban dan ketentraman masyarakat
 - b. Peningkatan fisik dan kompetensi anggota SATPOL PP yang belum memadai
 - Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - a. Satpol PP bekoordinasi dengan instansi vertikal untuk membuat Peta Rawan Trantibum
 - b. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk sarana dan prasarana pada Satpol PP
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kinerja program Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat mempunyai Indikator kinerja Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah anggota satlinmas yang dilatih dan dikukuhkan dibagi dengan anggota satlinmas se Provinsi Kep. Babel dikali 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1280+1381/2253) \times 100\% = 118\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 35,94% atau sebesar 328%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi) dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 65,39 %

(capaian tahun lalu).

- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Sinergitas kinerja Satlinmas Provinsi Ke Kabupaten/Kota
 - Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Minimnya kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dalam pelaksanaan tugas di lapangan
 - Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - a. Pendukung SATGAS SATLINMAS untuk melakukan pembinaan terhadap SATLINMAS PProvinsi, Kabupaten, Kota
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kinerja program Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat mempunyai Indikator kinerja Persentase personil Satpol PP yang berkompeten formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah anggota Satpol PP PNS yang memiliki sertifikasi/standarisasi sesuai dengan jabatannya dibagi dengan seluruh anggota Satpol PP Provinsi Kep. Babel dikali dengan 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(375/501) \times 100\% = 74,85\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 81,1% atau sebesar 92,29%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 80,18% (capaian tahun lalu).
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Pembelian Sarana dan Prasarana untuk peningkatan fisik Satpol PP
 - Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Minimnya pembiayaan pengembangan SDM AParatur Satuan Polisi Pamong Praja
 - Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - a. Pemenuhan pembiayaan pengembangan SDM AParatur Satuan Polisi

Pamong Praja sesuai surat Kemendagri No Surat 900.1.2/9364/BPSDM

4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kinerja program Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat mempunyai Indikator kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegaskan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah perda/perkada yang ditegaskan dibagi jumlah seluruh perda/perkada yang mengandung sanksi dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(8/16) \times 100\% = 50\%$ dari target 42,86% atau sebesar 116%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 45,83% (capaian tahun lalu).
 - Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Sinergitas kerja sama Satpol PP dengan TNI/POLRI
 - Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Minimnya pembiayaan pengembangan Kompetensi dan keterampilan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS
 - b. Belum tersusunnya Peta Rawan Tibum
 - Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - a. Pemenuhan pembiayaan pengembangan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sesuai surat Kemendagri No Surat 900.1.2/9364/BPSDM
 - b. Satpol PP bekoordinasi dengan instansi vertikal untuk membuat Peta rawan Trantibum
5. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan menurunnya dampak dari kejadian Pemadam, Penyelamatan dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai Indikator kinerja Persentase Respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah respon time 15 menit kejadian kebakaran atau pertolongan, dimulai dari informasi kebakaran diterima sampai dengan pelaksanaan pertolongan penanggulangan

kebakaran/ dibagi dengan jumlah seluruh kebakaran/kejadian pertolongan yang terjadi se Provinsi Kep. Babel. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(148/170) \times 100\% = 87,05\%$ dari target 70% atau sebesar 124%(capaian dibagi dengan target). Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 72,66% (capaian tahun lalu).

- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Koordinasi dan sinergitas Antara Damkar Provinsi Kabupaten Kota dengan angkasa pura , tim animal rescue dan instansi yang terkait
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
 - a. Minimnya kapasitas anggota pemadam kebakaran dan Pengembangan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - b. Minimnya Informasi daerah rawan bencana kebakaran
 - c. Belum tersusunya Peta Rawan Kebakaran
 - d. Sarana dan Prasarana yang belum optimal
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - a. Penyusunan Peta Rawan Kebakaran
 - b. Pembelian Sarana dan Prasarana Damkar untuk Pelayanan SPM optimal
 - c. Pengembangan kompetensi, sertifikasi serta ketrampilan pemadam kebakaran

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Indikator kinerja Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah gangguan trantibum yang ditindak dibagi jumlah gangguan trantibum yang diketahui oleh Satpol PP Provinsi Kep. Babel dikali 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(506/496) \times 100\% = 102\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 100% atau sebesar 98,03%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 80% (capaian tahun lalu).	*	100	*	102	*	100
2.	Indikator kinerja Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah anggota satlinmas yang dilatih dan dikukuhkan dibagi dengan anggota satlinmas se Provinsi Kep. Babel dikali 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1280+1381/2253) \times 100\% = 118\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 35,94% atau sebesar 30,45%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi) dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 65,39 % (capaian tahun lalu).	*	35,94	*	118	*	100
3.	Indikator kinerja Persentase personil Satpol PP yang berkompeten formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah anggota Satpol PP PNS yang memiliki sertifikasi/standarisasi sesuai dengan jabatannya dibagi dengan seluruh anggota Satpol PP Provinsi Kep. Babel dikali dengan 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah	*	81,1	*	92,29	*	100%

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
	$(375/501) \times 100\% = 74,85\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 81,1% atau sebesar 92,29%..						
4..	Indikator kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah perda/perkada yang ditegakkan dibagi jumlah seluruh perda/perkada yang mengandung sanksi dikali 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(8/16) \times 100\% = 50\%$ dari target 42,86% atau sebesar 116%.	*	42,86	*	116	*	100

- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator nihil berada diatas/dibawah Target Nasional. (Tercapainya Indeks Trantibum dengan Kategori Baik)
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator nihil berada diatas/dibawah Realisasi Nasional.
- Sebagai kesimpulan capaian indikator nihil berada diatas/dibawah capaian Nasional yaitu sebesar nihil %

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (indikator ke 1) melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.1.1.2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Melekat pada Bidang ketentraman dan ketertiban Umum dan Bidang Penegakkan Perda dan Perkada kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar Rp7.277.280
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sebesar Rp. 190.281.700
- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator nasional berbeda dengan target indikator daerah (Target Nasional Terpenuhi kebutuhan SPM Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan standar berada diatas/dibawah Target Nasional.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator (berbeda dengan target indikator pusat tetapi tujuannya sama) berada diatas/dibawah Realisasi Nasional.
- Sebagai kesimpulan capaian indikator . (berbeda dengan target indikator pusat tetapi tujuannya sama) berada diatas/dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 75 %

3.1.1.3. Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Melekat pada Bidang Pencegahan, Penanggulanganm penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Provinsi sebesar Rp 2.736.389.400
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, penyelematan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp.98.999.750

3.1.1.4. Data Dukung Capaian Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gambar III.1
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan pembinaan penyidik PPNS
2.		Pelaksanaan koordinasi dengan Kota Pangkalpinang

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
		untuk penertiban SPanduk, Baleho menjelang Pemilihan Umum
3		Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi bersama TNI dan POLRI
4		Pelaksanaan Kegiatan Rapat penyampaian Pendapat Unjuk rasa antara Pimpinan bersama masyarakat

3.1.1.5. Data Dukung Capaian Persentase personil satpol pp yang berkompeten Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Pelaksanaan kegiatan personil satpol pp yang berkompeten
2.		Pelaksanaan kegiatan personil satpol pp yang berkompeten

3.1.1.6. Data Dukung Capaian Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
-----	----------------------------------	------------

1.		<p>Pelaksanaan kegiatan PEMBERDAYAAN SATLINMAS Kabupaten/Kota</p>
2.		<p>Pelaksanaan kegiatan PEMBERDAYAAN SATLINMAS Kabupaten/Kota</p>

3.1.1.7. Data Dukung Capaian Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang dapat diselesaikan) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gambar III.2
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR DI KAWASAN BADAN JALAN JEMBATAN EMAS</p>
2.		<p>SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR DI KAWASAN BADAN JALAN JEMBATAN EMAS</p>
3		<p>DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAWASAN PADA HARI JUM'AT TANGGAL 01 NOVEMBER 2024 DI PPI (PELABUHAN PENDARATAN IKAN) MUARA BATURU RUSA PANGKALPINANG</p>

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
4		Pelaksanaan Kegiatan Penegakkan Perda dan Perkada

3.1.2. Sasaran 2: Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran

Kinerja sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat diukur dengan indikator Persentase penurunan gangguan trantibum Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	$(\text{Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran}) + (\text{Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran}) / 2 \times 100\%$

Kinerja sasaran Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $(\text{Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran}) + (\text{Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran}) / 2 \times 100\%$ Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 4,9% atau sebesar 100% dari target 4,9%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing

program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
(tabel ini dapat di buat landscape)

No	IndikatorSasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	4	4	100	4,9%	100	4,9%	6	6

Analisis Ketercapaian Sasaran Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran adalah sebagai berikut:

- Tercapai 100 (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 4,9%(terlampau).
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 5 % (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran mengalami peningkatan) sebesar (0, 1)%
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan menurunnya dampak dari kejadian Pemadam, Penyelamatan dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai Indikator kinerja Persentase Respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah respon time 15 menit kejadian kebakaran atau pertolongan, dimulai dari informasi kebakaran diterima sampai dengan pelaksanaan pertolongan penanggulangan kebakaran/ dibagi dengan jumlah seluruh kebakaran/kejadian pertolongan yang terjadi se Provinsi Kep. Babel. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(148/170) \times 100\% = 87,05\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 70% atau sebesar 80,41%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi

dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 72,66% (capaian tahun lalu).

- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Koordinasi dan sinergitas Antara Damkar Provinsi Kabupaten Kota dengan angkasa pura , tim animal rescue dan instansi yang terkait
 - Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
 - a. Minimnya kapasitas anggota pemadam kebakaran dan Pengembangan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - b. Minimnya Informasi daerah rawan bencana kebakaran
 - c. Belum tersusunya Peta Rawan Kebakaran
 - d. Sarana dan Prasarana yang belum optimal
 - Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - a. Penyusunan Peta Rawan Kebakaran
 - b. Pembelian Sarana dan Prasarana Damkar untuk Pelayanan SPM optimal
 - c. Pengembangan kompetensi, sertifikasi serta ketrampilan pemadam kebakaran

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
-----	-----------------------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------	--------------

1.	Indikator kinerja Persentase Respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah respon time 15 menit kejadian kebakaran atau pertolongan, dimulai dari informasi kebakaran diterima sampai dengan pelaksanaan pertolongan penanggulangan kebakaran/ dibagi dengan jumlah seluruh kebakaran/kejadian pertolongan yang terjadi se Provinsi Kep. Babel. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(148/170) \times 100\% = 87,05\%$ dari target 70% atau sebesar 80,41%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 72,66% (capaian tahun lalu).	*75	70	*	87,05	*	100
----	--	-----	----	---	-------	---	-----


- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator nasional berbeda dengan target indikator daerah (Target Nasional Terpenuhi kebutuhan SPM Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan standar berada diatas/dibawah Target Nasional).
- b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator (berbeda dengan target indikator pusat tetapi tujuannya sama) berada diatas/dibawah Realisasi Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator . (berbeda dengan target indikator pusat tetapi tujuannya sama) berada diatas/dibawah capaian Nasional yaitu sebesar nihil %

3.1.2.1. Data Dukung Capaian Persentase Respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan melalui Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.1.2.2. Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Melekat pada Bidang Pencegahan, Penanggulanganm penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Provinsi sebesar Rp .2.736.389.400

- 
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp.98.999.750

Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Gambar III.3

Kegiatan Bidang Pencegahan, Penanggulanganm penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p align="center">Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan rawan bencana kebakaran</p>
2.		<p align="center">Kegiatan Pembinaan dan pengawasan, pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</p>

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		Efisiensi	
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	5,50	5,50	100	7.277.280.200	6.763.262.245	92,93%	514.017.955
2	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	4,90	4,90	100	2.835.385.100	2.707.672.889	95,49%	127.712.212
Total Belanja						10.112.665.300	9.470.935.134	94,21	641.730.167 (efisiensi)

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar **Rp10.112.665.300** terealisasi **Rp. 9.470.935.134** atau **94,21%** sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp **641.730.167.** yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Operasi (efisiensi SPPD, belanja makan dan minum, belanja BBM)
- Efisiensi Belanja Modal (Penghapusan sarana dan prasarana)

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 70/98/LHE-ITDA/2025, Tanggal 28 April 2025 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>7. Melakukan upaya sehingga data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung pengukuran kinerja yang diharapkan</p> <p>8. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang</p> <p>9. Menyusun laporan kinerja dan konitoring evaluasi triwulan secara berkala</p> <p>10. Melakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan SAKIP</p> <p>11. Melakukan upaya sosialisasi dan implemtasi terhadap seluruh pegawai sehingga sepenuhnya peduli dan menjadikan laporan kinerja pedoman memperbaiki knerja</p> <p>12. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah:</p> <p>7. sudah dilakukan penyusunan SOP terkait dengan pengumpulan data kinerja dan Dokumen Pendukung Capaian Kinerja</p> <p>8. Dokumen Monev program dan kegiatan triwulan pada PD berjenjang</p> <p>9. Menyusun rencana Laporan kinerja per triwulan berikutnya dengan menjelaskan target, realisasi dan capaian kinerja triwulan berjalan dan tahun sebelumnya</p> <p>10. melakukan rapat internal untuk tindak lanjut terhadap Kertas Kerja Evaluasi Mandiri</p> <p>11. melaksanakan dan ikut serta pada setiap melaksanakan pelatihan/diklat/bimtek/workshop/ sosialisasi/ evaluasi SAKIP dan menindaklanjuti kembali hasil bimtek tersebut pada OPD</p> <p>12. sudah dilakukan dokumentasi dan pemberitaan pada setiap kegiatan POL PP</p>

Bukti dukung tindak lanjut atas rekomendasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Pdf bukti dukung no 1 (surat undangan pelaksanaan rapat evaluasi per bidang-bidang untuk target, realisasi dan capaian kinerja bidang)
2. Pdf bukti dukung no 2 (foto rapat internal penyusunan laporan kinerja)
3. Pdf bukti dukung no 3 (daftar hadir Coaching clinic per bidang)

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Link <https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id>. seperti layanan pengaduan dari masyarakat, untuk memudahkan informasi pelayanan SATPOLPP kepada masyarakat

3.5 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

Melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat

3.6 Crosscutting

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya

CROSS CUTTING

Pemerintah Provinsi

Satuan Polisi Pamong Praja Koordinasi Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umu Serta Perlindungan Masyarakat

Lintas OPD Pemerintah Provinsi

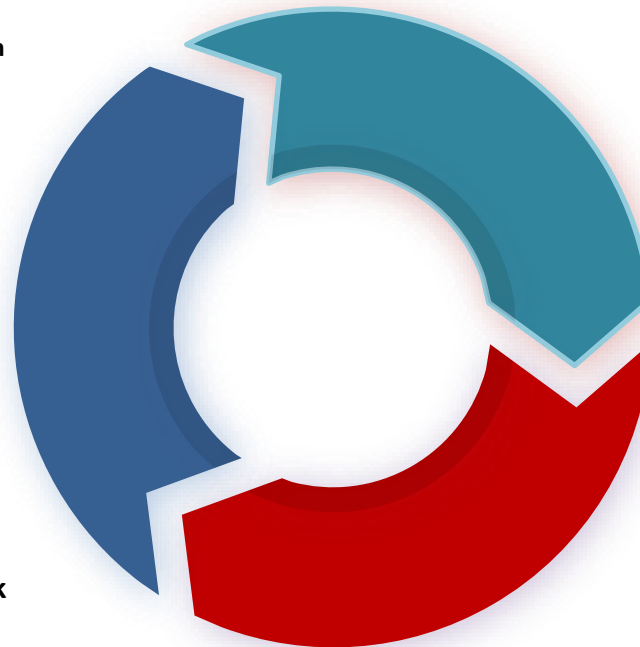
- Seluruh OPD Provinsi yang memiliki Perda yang Mengandung Subtansi Sanksi
- TNI/POLRI : Koordinasi Pelaksanaa Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umu serta Perlindungan Masyarakat
- BPBD Provinsi : Koordinasi Masalah Kebakaran
- Dinas Kesehatan : Koordinasi Pengembangan Fisik Anggota

Pemerintah Pusat

- Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri : Koordinasi Pelaksanaan Urusan SatpolPP dan Kebakaran
- Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Pelaksanan Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas

Stakeholder Lainnya

- Angkasa Pura : Koordinasi Pemakaian Alat-alat Pemadam Kebakaran
- Pertamina : Koordinasi Pemakaian Alat-alat Pemadam Kebakaran
- PLN : Koordinasi Pemakaian Alat-alat Pemadam Kebakaran
- Alobi : Koordinas Pengamanan Animal Rescue



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dibelanjakan secara optimal, hal ini dikarenakan Himbauan Surat Edaran Gubernur 903.0583/Bakuda, Tanggal 29 September 2025 tentang Penundaan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2025 dimana perlu penghematan/penundaan realisasi belanja daerah pada setiap perangkat daerah sebesar 20% dikarenakan takut ada resiko gagal bayar menjadi tanggung jawab kepala SKPD yang bersangkutan
2. Surat Edaran Gubernur Nomor : 100.3.4.1/0695/VII tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Prov/Kab/Kota perlu memperkuat pemetaan SDM, kelembagaan, anggaran untuk basis perencanaan dan dasar untuk intervensi kebijakan asistensi-supervisi dan pemberian bantuan
4. Optimalisasi call centre terintegrasi dan pemanfaatan data yang kuat untuk basis penentuan unit layanan dalam hal memberi layanan damkar terdekat dan tercepat sesuai
5. Mendorong upaya Pemadam Kebakaran untuk mewujudkan respon time 15 minute dengan memperhatikan keterjangkauan rasio luas daerah dengan pos
6. Laporan SPM ke depannya harus sudah mengedepankan pelaporan berbasis mutu

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Tetap mengoptimalkan implementasi pelaksanaan kegiatan yang menunjang urusan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
2. Memaksimalkan implementasi Perda/Pergub Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dengan

meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

3. Memaksimalkan nilai-nilai budaya kerja dan pergerakan agen -agen perubahan didalam internal SATPOL PP
4. Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta peningkatan kompetensi ada SATPOL PP dan Pemadam kebakaran dalam pelaksanaan urusan trantibumlinmas
5. Membuat pelayanan pegaduan ON line masyarakat yang disebarkan melalui program PPID
6. Pemerintah, LSM, swasta dan stakeholders harus lebih meningkatkan kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel melalui banyak media seperti, diskusi, workshop, media massa ataupun fasilitas web. Penyedia layanan transportasi.

4.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal dengan secara lebih intensif.
4. Pemberian reward dan punishment yang adil bagi ASN di lingkup SATPOL PP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	persentase penurunan gangguan trantibum	5.00	5,50	6,00	5.00
2.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Menurunnya dampak dari kejadian pemadam, penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakarann	persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	4	4,90	4,80	4,70

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

bit.ly/SKIKUPERUBAHAN2025POLPP

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

<https://bit.ly/PK2025POLPP>

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 disertai dengan Berita Acara

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi Tahun 2025

<https://bit.ly/MONEVSATPOLPP2025>

Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2025

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2025

<https://bit.ly/TLSAKIPINPTD2025>

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025